

PAPER TEORI AKUNTANSI

Dosen Pengampu : Dr. Pujiati, M.Pd., Drs. Nurdin, M.Si., dan Galuh Sandi, M.Pd.

Kelompok 8

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Maya Khoyrotun Nisa | 2413031045 |
| 2. Murni Solekha | 2413031061 |

PROSES STANDARD-SETTING & EKONOMI POLITIKNYA

I. PENDAHULUAN

Akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai sistem untuk mencatat dan melaporkan keadaan keuangan, namun juga sebagai praktik sosial yang dipengaruhi oleh sikap manusia serta perubahan dalam aspek ekonomi dan politik. Dalam praktiknya, proses pembuatan dan penerapan standar akuntansi tidak sepenuhnya bersifat teknis dan objektif, karena juga dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah, regulator, investor, manajer, dan masyarakat secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa akuntansi adalah hasil dari interaksi yang rumit antara faktor perilaku, ekonomi, dan politik.

Proses standard setting menunjukkan usaha untuk mencapai keseragaman dan keandalan dalam laporan keuangan, namun sering kali menghadapi pengaruh dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda secara politik dan ekonomi. Pemahaman terhadap keterkaitan antara aspek perilaku, standard setting, dan politik ekonomi dalam akuntansi sangat penting untuk menilai bagaimana keputusan akuntansi diambil serta bagaimana informasi keuangan dapat memengaruhi kebijakan dan perilaku ekonomi.

II. TINJAUAN TEORI

1. Aspek Perilaku dalam Akuntansi

Akuntansi keperilakuan (behavioral accounting) merupakan ilmu akuntansi yang dikombinasikan dengan ilmu sosial untuk meneliti dampak perilaku manusia terhadap data akuntansi dan pengambilan keputusan dalam bisnis. Tujuan dari akuntansi perilaku adalah untuk menjelaskan, memprediksi,

dan mengendalikan proses akuntansi serta informasi yang dihasilkan oleh akuntansi terhadap tingkah laku manusia.

Terkait dengan perilaku, penting untuk dipahami bahwa akuntansi muncul dari interaksi sosial, seperti saat individu bertransaksi dalam kegiatan produksi barang atau jasa dan kegiatan perdagangan (yang menghasilkan akuntansi keuangan); atau interaksi dengan pemerintah untuk memenuhi kewajiban pajak (yang menghasilkan akuntansi perpajakan) atau interaksi antara pemerintah dengan regulasi (yang menghasilkan akuntansi sektor publik); atau interaksi di antara para manajer yang menggunakan informasi keuangan dari akuntansi (yang menghasilkan akuntansi manajemen).

Aspek perilaku dalam akuntansi mencakup sangat luas, meliputi:

- a. Penerapan ilmu perilaku pada perancangan dan pembangunan sistem akuntansi.
- b. Penelitian tentang reaksi individu terhadap format dan isi laporan akuntansi.
- c. Metode bagaimana informasi diolah untuk mendukung pengambilan keputusan.
- d. Pengembangan teknik pelaporan yang dapat menyampaikan perilaku pengguna data, dan
- e. Pengembangan strategi yang digunakan untuk mendorong dan mempengaruhi perilaku, aspirasi, serta tujuan individu yang mengelola perusahaan.

2. Proses Standard Setting dalam Akuntansi

Perkembangan standar akuntansi telah mengalami peningkatan yang sangat cepat. Standar yang dibentuk berfungsi sebagai pengungkapan, keseragaman, regulasi, dan pengukuran (Purba, Rahmania, dan Utami, 2018). Dengan kata lain, standar dibentuk untuk mengungkapkan rahasia, membuat keseragaman, sebagai aturan dan pengukuran. Menurut (Vinet dan Zhedanov, 2011), standar akuntansi berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan tindakan akuntansi terhadap suatu peristiwa. Pedoman ini dapat berupa pengertian atau definisi, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan dalam praktik akuntansi. Aktivitas akuntansi ini dibuat dan dilaksanakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan sosial tertentu.

Standar akuntansi merupakan suatu pedoman dan format baku dalam penyediaan informasi laporan keuangan dari suatu kegiatan usaha. Standar akuntansi dibuat, disusun dan disahkan oleh lembaga resmi (Standard Setting Body). Didalamnya terdapat penjelasan tentang transaksi yang perlu dicatat, metode pencatatannya, serta cara penyajian laporannya.

3. Politik Ekonomi dalam Akuntansi

Proses penetapan standar akuntansi tidak dapat dipisahkan dari pengaruh politik. Seperti halnya di bidang kehidupan lainnya, politik juga memiliki peran dalam dunia akuntansi. Pilihan terkait standar akuntansi yang akan diterapkan tidak hanya didasarkan pada aspek teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh beragam kepentingan kelompok yang berbeda. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu berhati-hati terhadap kemungkinan adanya intervensi politik dalam pembuatan standar (Melinda, 2024).

III. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Aspek Perilaku dalam Akuntansi

Dalam praktik akuntansi, perilaku individu memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana informasi keuangan disusun dan disajikan. Akuntan, auditor, maupun manajer sering kali tidak bertindak secara logis seperti yang diperkirakan dalam teori ekonomi tradisional. Para akuntan secara berkelanjutan membuat beberapa asumsi mengenai bagaimana mereka memotivasi orang lain, bagaimana mereka menginterpretasikan dan menggunakan informasi akuntansi, serta bagaimana sistem akuntansi mereka sesuai dengan kenyataan manusia dan memengaruhi organisasi. Penjelasan ini menunjukkan adanya aspek keperilakuan dalam akuntansi, baik dari pihak pelaksana (penyusun informasi) maupun dari pihak pemakai informasi akuntansi.

Pihak pelaksana merupakan individu atau kelompok yang mengoperasikan sistem informasi akuntansi dari awal hingga terwujudnya laporan keuangan. Peran mereka penting karena hasil kerja mereka dapat memberikan manfaat bagi kemajuan organisasi melalui peningkatan kinerja dan penetapan standar kerja yang efektif.

Di sisi lain, pihak pemakai laporan keuangan juga menunjukkan aspek perilaku yang tidak kalah penting. Pemakai informasi akuntansi dapat dibagi

menjadi dua kelompok, yaitu pihak internal (manajemen) dan pihak eksternal (pemerintah, investor, kreditur, dan pihak lainnya). Bagi pihak internal, informasi akuntansi digunakan untuk memotivasi dan menilai kinerja, sedangkan bagi pihak eksternal, informasi tersebut menjadi dasar dalam menilai kinerja perusahaan sekaligus dalam pengambilan keputusan bisnis. Selain itu, pihak eksternal juga perlu mendiskusikan dan menafsirkan informasi akuntansi sesuai dengan kepentingan dan sudut pandang masing-masing, karena perilaku mereka dalam memproses informasi dapat memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil.

Terdapat beberapa aspek penting yang menjadi bagian dari akuntansi keprilakuan, yaitu:

- 1) Teori organisasi dan keprilakuan manajerial, yang menjelaskan perilaku komponen organisasi dalam mencapai tujuan bersama.
- 2) Pengambilan keputusan, yang berfokus pada teori dan model bagaimana individu menggunakan informasi akuntansi dalam membuat keputusan ekonomi.
- 3) Pengendalian, yang mencakup aspek perilaku dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan efektif agar tujuan organisasi tercapai.
- 4) Pelaporan keuangan, yang meliputi perilaku perataan laba, keandalan, dan relevansi informasi akuntansi bagi para pengguna, serta masalah keagenan dalam manajemen laba.

Keempat aspek tersebut menunjukkan bahwa aspek perilaku tidak hanya menekankan tindakan individu dalam membuat laporan keuangan, tetapi juga bagaimana sistem akuntansi berhubungan dengan perilaku manusia di semua tingkatan organisasi. Oleh karena itu, akuntansi dapat dipahami sebagai kegiatan sosial dan psikologis yang mencerminkan nilai-nilai, motivasi, serta interaksi antar individu dalam suatu organisasi.

2. Standard Setting dalam Akuntansi

Standar akuntansi pada dasarnya dibuat untuk mewujudkan keterbukaan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, standar ini bertujuan untuk menyampaikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya bagi beragam pemangku kepentingan, seperti para investor, pemberi pinjaman, dan pihak pengawas. Selain itu, standar ini juga berfungsi sebagai aturan umum yang memastikan konsistensi dalam pelaksanaan akuntansi, sehingga laporan keuangan dari berbagai organisasi bisa dibandingkan. Salah satu tujuan utama lainnya adalah untuk membatasi kebebasan manajemen dalam manipulasi angka-angka (*moral hazard*) demi kepentingan pribadi. Meskipun demikian, proses penyusunan standar itu sendiri merupakan suatu proses politik yang kompleks, di mana berbagai kepentingan kelompok akan saling beradu, sehingga *moral hazard* dalam bentuk yang berbeda tetap berpotensi terjadi (Melinda, 2024).

Ada empat macam standar akuntansi di Indonesia, yaitu:

a. PSAK-IFRS

PSAK-IFRS (*Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan – International Financial Reporting Standards*) adalah SAK yang telah mengadopsi IFRS dan berlaku di Indonesia. Standar ini adalah patokan penyusunan, pencatatan, penyajian, dan perlakuan laporan keuangan, agar informasi keuangan yang dihasilkan, relevan bagi pengguna laporan.

PSAK digunakan oleh perusahaan (*entitas*) yang memiliki akuntabilitas publik, baik yang sudah terdaftar di pasar modal, maupun yang masih dalam proses pendaftaran pasar modal. Alasan IFRS dijadikan pedoman SAK karena Indonesia merupakan anggota *International Federation of Accountants (IFAC)* yang menjadikan IFRS sebagai standar akuntansinya.

b. SAK-ETAP

SAK ETAP adalah Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Standar ini dipakai oleh entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan sehingga entitas perusahaan dimaksud menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi penggunaan

eksternal ETAP merupakan hasil penyederhanaan standar akuntansi IFRS yang meliputi tidak adanya penilaian untuk aset tetap, aset tidak berwujud dan laporan laba/rugi yang komprehensif Standar akuntansi IFRS yang disederhanakan juga meliputi tidak adanya pilihan menggunakan nilai revaluasi (wajar), serta tidak ada pengakuan liabilitas dan aset pajak tangguhan karena beban pajak diakui sebesar jumlah pajak menurut ketentuan pajak.

c. PSAK Syariah

PSAK Syariah digunakan oleh entitas yang melakukan transaksi berbasis syariah, baik lembaga syariah maupun non-syariah. Standar ini mengikuti model SAK umum tetapi disesuaikan dengan fatwa MUI. PSAK Syariah mengatur penyusunan, penyajian, dan pengungkapan laporan keuangan serta transaksi khas syariah seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, salam, dan istishna.

Di Indonesia format standar yang satu ini kerap digunakan oleh lembaga-lembaga yang mengusung kebijakan syariah seperti industri perbankan syariah, pegadaian yang bersifat syariah, badan zakat dan masih banyak lagi entitas bisnis yang menerapkan hukum syariah dalam praktiknya.

d. SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)

SAP diterbitkan sebagai peraturan pemerintah (PP) yang diterapkan untuk entitas pemerintah dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan keuangan pokok menurut Standar Akuntansi Pemerintah adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. SAP dibuat untuk menjamin transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih.

Fungsi Standar Akuntansi:

1. Untuk keseragaman laporan keuangan.
2. Memudahkan penyusunan laporan keuangan.
3. Mempermudah auditor dan pembaca laporan keuangan untuk memahami dan membandingkan laporan keuangan entitas berbeda-beda.

3. Pengaruh Politik Dalam Penentuan Standar Akuntansi

Proses pengembangan standar merupakan suatu proses yang berkaitan dengan politik, karena terdapat elemen-elemen politik dalam akuntansi yang sebanding dengan aspek fisik politik. Ini memerlukan ketelitian dalam mempertimbangkan apakah politik mempengaruhi penetapan standar akuntansi. Sebab itu, di waktu yang akan datang, FASB perlu memperhatikan isu ini agar kredibilitas akuntansi tetap terjaga. Pertimbangan yang bersifat politik mempengaruhi cara pembuatan standar akuntansi dan pilihan ekonomi individu yang pada akhirnya juga berdampak pada tujuan ekonomi secara keseluruhan.

Sensitivitas etika menggambarkan kemampuan seorang profesional untuk menunjukkan tindakan yang sesuai dengan prinsip etika serta untuk mengenali dan memahami konflik etis. Ketidakberdayaan dalam mengambil keputusan berdasarkan prinsip etika dapat menyebabkan kekacauan dalam sistem moral dalam mengidentifikasi masalah etika (Firdiansyah et al. , 2024).

Pengaruh politik dalam penentuan standar akuntansi memiliki efek yang signifikan. Keputusan politik berkaitan dengan akuntansi tidak hanya berdampak pada masing-masing perusahaan, tetapi juga bisa berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Sebagai contoh, standar akuntansi yang terlalu longgar atau terlalu ketat bisa memengaruhi sikap investasi, pilihan bisnis, dan bahkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, penting untuk mencapai keseimbangan antara aspek politik dan teknis dalam proses pembuatan standar akuntansi.

IV. PENUTUP

Proses penyusunan standar akuntansi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor perilaku, ekonomi, dan politik. Aspek keperilakuan dalam akuntansi menunjukkan bahwa keputusan akuntan, manajer, dan pengguna laporan keuangan sering kali dipengaruhi oleh motivasi dan persepsi individu, bukan hanya oleh data objektif. Di sisi lain, proses standard setting berperan penting dalam menciptakan keseragaman, transparansi, dan keandalan laporan keuangan, meskipun dalam praktiknya tetap menghadapi pengaruh kepentingan politik dan ekonomi.

Berbagai standar akuntansi di Indonesia seperti PSAK-IFRS, SAK ETAP, PSAK Syariah, dan SAP menunjukkan upaya untuk menyesuaikan pedoman pelaporan keuangan dengan kebutuhan dan karakteristik entitas yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi penyusun standar dan praktisi akuntansi untuk menjaga keseimbangan antara aspek teknis, etika, dan kepentingan publik agar standar yang dihasilkan tetap relevan, kredibel, dan bermanfaat bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

STUDI KASUS

Multitafsir PSAK 71, 72, dan 73 Picu Sengketa Pajak

Kasus sengketa pajak yang muncul akibat penerapan tiga standar akuntansi baru, yaitu PSAK 71, PSAK 72, dan PSAK 73, menjadi salah satu contoh nyata bagaimana proses standard-setting akuntansi dapat memunculkan persoalan ekonomi politik di Indonesia. Ketiga PSAK tersebut mulai berlaku pada tahun 2020 dan wajib diterapkan dalam laporan keuangan yang dilampirkan pada Surat Pemberitahuan (SPT), Pajak Penghasilan Badan. Namun, penerapan standar baru ini justru menimbulkan perbedaan tafsir antara pihak perusahaan dengan otoritas pajak.

Penerapan tiga standar akuntansi baru, yaitu PSAK 71 tentang instrumen keuangan, PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, dan PSAK 73 tentang sewa, menimbulkan persoalan antara perusahaan dan otoritas pajak. Ketiga standar tersebut mulai berlaku pada tahun 2020 dan diadopsi dari IFRS dengan tujuan meningkatkan kualitas serta transparansi laporan keuangan. Namun, perbedaan prinsip antara standar akuntansi dan peraturan perpajakan menyebabkan munculnya banyak sengketa pajak.

Pada PSAK 71, perusahaan diwajibkan mengakui keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi (*unrealized gains/losses*). Dalam akuntansi, hal ini dianggap penghasilan, tetapi dalam perpajakan Indonesia yang menganut doktrin realisasi, penghasilan baru diakui jika benar-benar diterima. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan apakah *unrealized gain* dapat dikenai pajak. Begitu pula PSAK 72 yang menggunakan pendekatan *transfer of control*, bukan *transfer of risk*, membuat waktu pengakuan pendapatan bisa berbeda dari ketentuan pajak. Sementara itu, PSAK 73 mewajibkan pengakuan semua sewa sebagai aset dan liabilitas, yang belum sepenuhnya diatur dalam sistem perpajakan nasional.

Perbedaan interpretasi ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara proses penetapan standar akuntansi dengan kebijakan fiskal pemerintah. Dari sisi ekonomi politik, kasus ini menunjukkan tarik-menarik kepentingan antara DSAK IAI sebagai pembuat standar, pemerintah melalui Ditjen Pajak sebagai pengumpul penerimaan negara, serta perusahaan yang berupaya menekan beban pajak.

Akibatnya, jumlah sengketa pajak terus meningkat, tercatat mencapai 16.634 kasus pada tahun 2020, naik 10,5 persen dibanding tahun sebelumnya. Kasus ini membuktikan bahwa penetapan standar akuntansi bukan hanya persoalan teknis, melainkan juga politis dan ekonomis. Proses standard-setting di Indonesia perlu mempertimbangkan kondisi regulasi perpajakan yang berlaku agar tidak menimbulkan multitafsir.

Tanggapan:

Sebagai tanggapan terhadap kasus ini, perlu dilakukan harmonisasi antara regulasi akuntansi dan perpajakan agar tidak terjadi perbedaan mendasar dalam penafsiran. Pemerintah dan DSAK IAI sebaiknya membentuk forum koordinasi permanen yang melibatkan otoritas pajak, akademisi, serta pelaku usaha dalam setiap proses penyusunan atau revisi standar akuntansi. Selain itu, edukasi dan sosialisasi terhadap penerapan PSAK baru harus diperluas agar seluruh pihak memahami dampak fiskalnya secara tepat.

Dengan adanya kolaborasi dan penyelarasan kebijakan tersebut, diharapkan ke depan proses standard-setting akuntansi di Indonesia tidak hanya menghasilkan standar yang berkualitas secara teknis, tetapi juga relevan secara ekonomi dan selaras dengan kebijakan fiskal nasional. Upaya ini akan meminimalkan sengketa pajak, meningkatkan kepastian hukum, dan memperkuat kepercayaan antara dunia usaha dan pemerintah.

Sumber: <https://artharayaconsult.com/2021/04/15/multitafsir-picu-sengketa-pajak/>

V. DAFTAR PUSTAKA

- Az-Zahra, L. C. (2025). Mekanisme transmisi konsekuensi ekonomi dari perubahan kebijakan akuntansi: studi literatur. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 3(5).
- Firdiansyah, Y., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2024). Dampak Pembelajaran Ekonomi Islam Dalam Membentuk Perilaku Moralitas Ekonomi Mahasiswa. 8(2), 132-139. <http://repository.uin-malang.ac.id/20308/>
- Harnoviansah, L., Anasta, L., & Sopanah, A. (2023). *Teori Akuntansi: Konsep dan Praktis*. Scopindo Media Pustaka.
- Melinda, N. (2024). Hubungan Proses Politik Dan Konsekuensi Ekonomi Mempengaruhi Pembentukan Standar Akuntansi Oleh Fasb. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(3), 20-28.
- Purba, A. S., Rahmania, E., & Utami, D. (2018). Dampak proses politik terhadap pembentukan standar akuntansi studi literatur fokus kepada fasb. *Akuntabel*, 15(2), 73–83. Retrieved from <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>
- Susanti, E. Y., Hariono, D., & Nur'Aini, N. A. (2022). Akuntansi Keperilakuan Dalam Perspektif Sistem Informasi Akuntansi. *El-Mahasaba*, 1(2).
- Vinet, L., & Zhedanov, A. (2011). A “missing” family of classical orthogonal polynomials. *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, 44(8), 285. <https://doi.org/10.1088/1751-8113/44/8/085201>